

BAB II

TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. *Transfer Pricing*

2.1.1. *Pengertian Transfer Pricing*

Transfer pricing merupakan sebuah praktik yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menentukan suatu harga atas transaksi-transaksi yang terjadi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa (Kurniawan, 2015). Gunadi (2007) juga menjelaskan bahwa *transfer pricing* adalah harga transfer atas barang maupun jasa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dilakukan atau terjadi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa baik yang berada di dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* terdiri dari dua poin utama yaitu transaksi antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, serta harga atas transaksi-transaksi.

2.1.2. *Tujuan Transfer Pricing*

Suandy (2011) menjelaskan bahwa dengan adanya globalisasi bisnis, praktik *transfer pricing* kemudian menjadi perhatian yang lebih serius, terutama dengan adanya isu pajak. Darussalam dkk. (2013) menyebutkan bahwa tujuan dari praktik *transfer pricing* dapat diklasifikasikan ke dalam sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal, *transfer pricing* bertujuan untuk memotivasi

pimpinan di anak perusahaan, memonitor dan mengevaluasi kinerja, serta untuk menyelaraskan sasaran bersama antara induk dan anak perusahaan. Sedangkan dari sisi eksternal, *transfer pricing* bertujuan untuk mengurangi pajak penghasilan, mengurangi beban tarif, meminimalkan risiko nilai tukar mata uang, serta menghindari konflik dari intervensi dengan negara tempat perusahaan beraktivitas, pengelolaan arus kas, dan daya saing.

2.1.3. Penentuan *Transfer Pricing*

Darussalam dkk. (2013) menyebutkan bahwa ada lima metode penentuan *transfer pricing* yang dapat dilakukan, yaitu:

1. *Comparable uncontrolled price (CUP) method*, yaitu metode yang membandingkan harga suatu barang dan jasa yang terjadi dalam transaksi antara pihak afiliasi dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak independen.
2. *Resale price method (RPM) method*, yaitu metode yang membandingkan laba kotor yang didapatkan atas transaksi antara pihak afiliasi dengan laba kotor yang didapatkan perusahaan atas transaksi yang dilakukan dengan pihak independen.
3. *Cost plus(C+) method*, yaitu metode yang membandingkan *mark-up* atas biaya dalam transaksi antar pihak afiliasi, dengan *mark-up* atas biaya yang dikenakan dalam transaksi independen.
4. *Profit split (PSM) method*, yaitu metode yang berupaya mengukur kewajaran atas suatu kompensasi (dalam hal ini laba) yang diterima

oleh perusahaan atas kontribusinya dalam grup perusahaan multinasional.

5. *Transactional net margin (TNMM) method*, yaitu metode yang memperbandingkan tingkat laba operasi yang diperoleh atas transaksi yang dilakukan kepada pihak independen dengan transaksi antar pihak afiliasi.

2.1.4. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Wajib pajak yang melakukan transaksi antar pihak afiliasinya wajib menerapkan suatu prinsip yaitu prinsip kewajaran serta kelaziman usaha. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor-32/PJ/2011 menjelaskan bahwa prinsip kewajaran dan kelaziman usaha merupakan suatu prinsip yang mengatur apakah transaksi yang dilakukan atau terjadi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan transaksi yang dilakukan kepada pihak independen sama atau sebanding. Untuk mengetahui apakah transaksi tersebut sebanding atau tidak, maka laba atau harga atas transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut harus sama ataupun berada di rentang laba dan harga atas transaksi yang dilakukan kepada pihak yang menjadi pembandingnya yaitu pihak independen.

2.1.5. Hubungan Istimewa

Suatu hubungan yang terjadi antara induk perusahaan dengan cabang, anak maupun dengan perwakilannya yang berada di dalam atau pun luar negeri dapat

dikatakan sebagai suatu hubungan istimewa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, hubungan istimewa dianggap ada apabila:

1. Wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya, atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih demikian pula hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir.
2. Wajib pajak yang menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung.
3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Suandy (2011) menjelaskan bahwa suatu hubungan istimewa dapat menyebabkan kekurangwajaran atas harga maupun biaya yang ditetapkan dalam suatu transaksi. Kekurangwajaran tersebut terjadi pada harga dalam transaksi pembelian, pembebanan bunga, penjualan, alokasi biaya, serta pembayaran atas komisi, waralaba, sewa, lisensi, royalti, dan imbalan jasa yang lain.

2.1.6. *Related Party Transaction (RPT)*

Huang *and* Liu (2010) juga mendefinisikan bahwa RPT adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan afiliasinya yaitu manajemen, pemilik modal, anggota dewan, maupun anggota keluarga dekat. Transaksi antara pihak berelasi dapat berupa transaksi penjualan, pembelian, piutang, maupun hutang

kepada pihak berelasi. Transaksi piutang maupun hutang yang terjadi antar pihak berelasi tersebut dapat timbul karena terjadinya transaksi seperti penjualan, pembelian, atau pengalihan barang dan jasa, sewa, peminjaman. Pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat melakukan hal yang tidak dapat dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan. Hal tersebut misalnya seperti menyepakati suatu transaksi (Agoes dan Trisnawati, 2013).

2.1.7. Pengukuran *Transfer Pricing*

Dalam penelitian ini, *transfer pricing* diukur dengan ada atau tidaknya penjualan kepada pihak berelasi (*Related Party Transaction*). RPT penjualan ini didasarkan pada ada atau tidaknya penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Kurniawan (2015) menjelaskan bahwa penjualan yang dilakukan kepada pihak berelasi mengindikasikan adanya *transfer pricing*. Pemanfaatan RPT dalam bentuk *transfer pricing* sering dilakukan dengan tujuan untuk mengecilkan beban pajak yang dibayar yaitu dengan praktik memperkecil penghasilan dari penjualan barang (Rahayu, 2010). RPT penjualan dipilih karena penjualan yang dilakukan oleh perusahaan memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan yang akan digunakan untuk menghitung laba akuntansi perusahaan. Selain itu variabel independen dalam penelitian ini yaitu beban pajak, kepemilikan asing, dan *tunneling incentive* erat hubungannya dengan transaksi penjualan antar pihak afiliasinya. Perusahaan akan berusaha untuk mengalihkan beban pajaknya dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang tarifnya lebih rendah, dan salah satu tindakannya adalah melakukan penjualan

kepada pihak afiliasinya dengan menetapkan harga yang lebih murah (Kurniawan, 2015). Selain itu akibat adanya kepemilikan asing, pemegang saham mayoritas akan berusaha melakukan tindakan yang menguntungkan pihaknya sendiri yaitu dengan cara mengendalikan perusahaan agar menjual dalam harga yang lebih rendah dari pada harga pasar.

Huang *and* Liu (2010) menyebutkan bahwa penjualan kepada pihak-pihak berelasi dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$RPT \text{ Penjualan} = \frac{\text{Penjualan kepada Pihak Berelasi}}{\text{Total Penjualan}}$$

2.2. Pajak

2.2.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan sesuatu yang tidak asing lagi pada era sekarang ini.

Waluyo (2013) menjelaskan bahwa pajak adalah:

“iuran kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan, yang terutang oleh wajib pajak dan harus membayarnya sesuai dengan peraturan-peraturan, tidak mendapatkan prestasi secara langsung, serta berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang diselenggarakan pemerintah yang berhubungan dengan tugas negara.”

2.2.2. Fungsi Pajak

Resmi (2017) menyebutkan bahwa dalam penggunaannya untuk kesejahteraan rakyat, pajak memiliki dua fungsi utama yaitu:

1. Fungsi *budgetair*

Fungsi *budgetair*, yaitu fungsi dimana pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara untuk membiayai pembangunan maupun pengeluaran yang sifatnya rutin. Dalam hal ini, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pembiayaan tersebut.

2. Fungsi *regulerend*

Fungsi *regulerend*, artinya pajak dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatur, mencapai tujuan tertentu serta melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun diluar bidang keuangan.

2.2.3. Penghindaran pajak

Perusahaan tentunya ingin memperoleh laba yang maksimal serta membayar pajak seminimal mungkin. salah satu upaya yang dilakukan perusahaan adalah dengan melakukan perencanaan pajak dengan cara penghindaran pajak untuk mengecilkan beban pajak yang harus dibayar. Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa penghindaran pajak adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah ketentuan perpajakan dan tidak melanggar Undang-Undang yang ada.

Salah satu bentuk penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional adalah dengan melakukan *transfer pricing*. Menurut

Kurniawan (2015), perusahaan multinasional melalui *transfer pricing* akan berusaha mengalihkan penghasilan kena pajaknya ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah supaya beban pajak yang ditanggung grup perusahaan menjadi lebih kecil.

2.2.4. Beban Pajak

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 46 tahun 2014 tentang pajak penghasilan menyebutkan bahwa beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode, sedangkan pajak tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer dan pembalikannya.

Beban pajak dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) karena mencerminkan total beban pajak yang ditanggung perusahaan serta besaran tarif pajak efektif yang ditanggung oleh perusahaan. Beban pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah beban pajak yang tercantum dalam laporan laba rugi perusahaan, karena beban pajak tersebut menunjukkan total beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Semakin tinggi nilai ETR, maka semakin besar juga beban pajak perusahaan, yang berarti semakin besar mendorong melakukan penghindaran pajak yaitu untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung. ETR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Lanis and Richardson, 2012):

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.3. Kepemilikan Asing

Isu tentang penanaman modal asing telah banyak dibicarakan. Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mendefinisikan modal asing sebagai modal yang dimiliki negara asing, perseorangan warga negara asing, dan badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Hal ini menyebabkan timbulnya kepemilikan asing yaitu porsi *outstanding share* yang dimiliki oleh pihak yang berstatus luar negeri baik badan hukum, perorangan maupun oleh pemerintah serta bagiannya terhadap jumlah seluruh modal saham yang beredar. Semakin tinggi persentase kepemilikan asing menunjukkan semakin besar kendalanya terhadap pengelolaan perusahaan serta mereka akan berusaha untuk memperoleh keuntungan mereka secara pribadi dengan mengalokasikan sumber daya perusahaan serta mempengaruhi keputusan dan kebijakan dalam penentuan harga serta jumlah dalam transaksi *transfer pricing*, yang disebut dengan praktik ekspropriasi. Kepemilikan asing tersebut diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Dunstanc, *et al.*, 2007).

$$\text{Kepemilikan asing} = \frac{\text{Jumlah saham pihak asing}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

2.4. Tunneling Incentive

Adanya perbedaan kepentingan dan tujuan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, serta lemahnya perlindungan hak pemegang saham minoritas menyebabkan pemegang saham mayoritas semakin terdorong untuk melakukan

tunneling yang dapat merugikan para pemegang saham minoritas (Claessens, *et al.*, 2000). Johnson, *et al.* (2000) menjelaskan bahwa *tunneling* merupakan aktivitas pengalihan laba (sumber daya) maupun aset keluar perusahaan kepada pemegang saham mayoritas. Johnson, *et al.* (2000) juga menjelaskan bahwa *tunneling incentive* merupakan kegiatan dimana pemegang saham mayoritas dengan mudah dapat mentransfer sumber daya dari perusahaan serta melakukan transaksi-transaksi untuk keuntungannya sendiri. Transaksi tersebut dapat berupa penjualan aset maupun kontrak seperti *transfer pricing* yang dapat menguntungkan pemegang saham mayoritas. Kharisma (2014) menyebutkan bahwa pemegang saham mayoritas akan mendapatkan keuntungan karena dapat mengendalikan perusahaan untuk menjual aset perusahaan dengan harga yang lebih murah kepada pemegang saham mayoritas atau perusahaan yang dikuasainya.

Dalam penelitian ini, *tunneling incentive* diukur dengan menggunakan rasio perhitungan yang menunjukkan nilai aset yang disalahgunakan melalui piutang pihak berelasi, dengan rumus sebagai berikut (Tang, 2016).

$$Tunneling\ incentive = \frac{\text{Piutang pihak berelasi}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

2.5. Teori Agensi

Penelitian Jensen *and* Meckling (1976) memberikan gambaran bahwa adanya hubungan kontrak yang terjadi antara agen dengan *principal*. Agen akan memiliki lebih banyak informasi dibandingkan dengan pemilik karena memiliki wewenang untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Sebenarnya, baik agen

maupun pemilik diasumsikan memiliki rasionalisasi ekonomi serta semata-mata untuk mementingkan kepentingan sendiri.

Suwardjono (2010) menjelaskan bahwa dalam teori keagenan, agen akan dianggap sebagai pihak yang berusaha mementingkan kepentingannya sendiri namun tetap memenuhi kontrak yang terjadi antara agen dan *principal*. Kontrak yang terjadi antara agen dan *principal* dapat dikatakan efisien apabila para pihak yang saling berkontrak dapat melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan tanpa perselisihan serta para pihak yang berkontrak akan sama-sama mendapatkan hasil yang paling optimal atas berbagai tindakan yang dilakukan agen. Namun, kenyataannya sering terjadi konflik perbedaan kepentingan antara agen dan *principal* karena kedua pihak sama-sama ingin mendapat keuntungan maksimal.

Dalam kaitan teori agensi dengan *transfer pricing*, akibat adanya konflik perbedaan kepentingan tersebut dapat merugikan *principal* dimana *principal* hanya mendapatkan akses informasi yang terbatas. Hal ini dikarenakan pemilik atau *principal* tidak terlibat secara langsung dalam mengelola perusahaan. Agen dapat mengenyampingkan kepentingan para *principal* karena memiliki wewenang dalam mengelola serta menjalankan operasional perusahaan secara keseluruhan. Agen dapat lebih mudah memanfaatkan insentifnya untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk menurunkan jumlah beban pajak yang harus dibayar, dan salah satu praktik yang dapat dilakukan adalah *transfer pricing*. Selain itu, adanya pemegang saham mayoritas yang dapat mengendalikan manajemen untuk mencapai keuntungan pribadi pemegang saham mayoritas. Maka, harapan dengan adanya teori agensi ini dapat mengurangi masalah keagenan yang terjadi.

2.6. Hubungan Antar Variabel

2.6.1. Pengaruh Beban Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Perusahaan tentunya ingin memperoleh laba secara maksimal namun membayar pajak seminimal mungkin. Upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalkan pajak, salah satunya adalah dengan melakukan penghindaran pajak. Perusahaan biasanya akan melaporkan laba lebih rendah dalam laporan keuangannya agar beban pajak yang dibayar menjadi lebih kecil. Salah satu upaya yang dapat dan sering dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk melaporkan laba yang rendah adalah dengan melakukan *transfer pricing*. Menurut Kurniawan (2015), perusahaan multinasional melalui *transfer pricing* akan berusaha mengalihkan penghasilan kena pajaknya ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah supaya jumlah beban pajak yang ditanggung grup perusahaan menjadi lebih kecil. Kurniawan (2015) juga menjelaskan bahwa salah satu transaksi yang sering terjadi yaitu penjualan yang dilakukan kepada pihak berelasi mengindikasikan adanya *transfer pricing*. Pemanfaatan *transfer pricing* dalam transaksi penjualan kepada pihak berelasi sering dilakukan dengan tujuan untuk mengefisienkan beban pajak yang harus dibayar yaitu dengan praktik memperkecil penjualan barang perusahaan agar penghasilan perusahaan menjadi lebih rendah (Rahayu, 2010). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tarif pajak suatu negara dan semakin besar beban pajak yang ditanggung perusahaan maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*.

2.6.2. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing*

Dunstanc, *et al.* (2007) menjelaskan bahwa kepemilikan asing adalah porsi *outstanding share* yang dimiliki oleh pihak yang berstatus luar negeri baik badan hukum, perorangan maupun oleh pemerintah serta bagiannya terhadap jumlah seluruh modal saham yang beredar. Semakin tinggi persentase kepemilikan asing menunjukkan semakin besar kendalinya terhadap pengelolaan perusahaan serta mereka akan berusaha untuk memperoleh keuntungan mereka secara pribadi dengan mengalokasikan sumber daya perusahaan serta mempengaruhi kebijakan dalam penentuan harga serta jumlah dalam transaksi *transfer pricing*, yang disebut dengan praktik ekspropriasi. Menurut Claessens, *et al.* (2000), kebijakan kontraktual yaitu kebijakan menetapkan harga transfer yang lebih murah kepada perusahaan yang berada dalam sepengendali merupakan salah satu bentuk tindakan ekspropriasi. Kepemilikan asing dapat memanfaatkan praktik *transfer pricing* khususnya melalui penjualan antar pihak afiliasi dengan menetapkan harga yang murah untuk menjual produk kepada perusahaan pribadinya sehingga kepemilikan asing akan memperoleh keuntungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin besar persentase kepemilikan asing pada suatu perusahaan maka akan semakin besar juga kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* khususnya dalam transaksi penjualan antar pihak afiliasi.

2.6.3. Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*

Claessens, *et al.* (2000) menyebutkan bahwa *tunneling* muncul akibat adanya masalah keagenan antara pemegang saham yaitu mayoritas dan minoritas. *Tunneling incentive* merupakan kegiatan dimana pemegang saham mayoritas dengan mudah dapat mentransfer sumber daya dari perusahaan serta melakukan transaksi-transaksi untuk keuntungannya sendiri. Transaksi tersebut dapat berupa penjualan aset maupun kontrak seperti *transfer pricing* yang dapat menguntungkan pemegang saham mayoritas (Johnson, *et al.*, 2000). Menurut Dynaty dkk. (2011), Pemegang saham mayoritas memiliki potensi untuk terlibat jauh dalam pengelolaan perusahaan dibandingkan pemegang saham minoritas karena pemegang saham mayoritas memiliki pengaruh yang lebih terhadap perusahaan. Hal tersebut menyebabkan pemegang saham mayoritas dapat mendorong perusahaan untuk melakukan *tunneling incentive* yang dapat menguntungkan dirinya. Kharisma (2014) menyebutkan bahwa pemegang saham mayoritas akan mendapatkan keuntungan karena dapat mengendalikan perusahaan untuk menjual aset perusahaan dengan harga yang lebih murah kepada pemegang saham mayoritas atau perusahaan yang dikuasainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar *tunneling incentive* yang dilakukan oleh perusahaan maka akan semakin besar juga kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* dalam transaksi penjualan kepada pemegang saham mayoritas. Hal ini dikarenakan *transfer pricing* merupakan salah satu upaya yang diterapkan oleh perusahaan untuk melakukan *tunneling incentive*.

2.7. Penelitian Terdahulu

2.7.1. Uraian Deskriptif

Penelitian ini menggunakan penelitian dari peneliti terdahulu untuk dijadikan sebagai tolak ukur serta acuan peneliti untuk menyelesaikannya. Selain itu, penelitian terdahulu juga digunakan untuk memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis dalam menyusun penelitian dari segi teori maupun konsep.

Penelitian pertama yaitu dengan judul “Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010-2013” yang di buat oleh Kiswanto (2014). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu pajak, kepemilikan asing, serta ukuran perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan hasil yaitu pajak dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Penelitian kedua yaitu dengan judul “Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, dan *Exchange Rate* pada Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan” yang dibuat oleh Azizah dan Marfuah (2014). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* sedangkan variabel independennya adalah pajak, *tunneling incentive*, dan *exchange rate*. Penelitian ini dilakukan pada semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan model regresi logistik. Hasil dari analisis data yang telah dilakukan adalah pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sedangkan *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Penelitian ketiga yaitu dengan judul “Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing)” yang dibuat oleh Noviaastika dkk. (2016). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu pajak, *tunneling incentive*, dan *good corporate governance*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model regresi logistik. Hasil dari analisis data yang telah dilakukan yaitu pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sedangkan *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*.

Penelitian keempat yaitu dengan judul “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, dan Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang *Listing* di BEI Tahun 2011-2014” yang dibuat oleh Refgia (2017). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* sedangkan variabel independen dalam penelitian ini

yaitu pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, dan kepemilikan asing. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan hasil dari analisis data yang telah dilakukan yaitu pajak dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sedangkan mekanisme bonus dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Penelitian kelima yaitu dengan judul “Pengaruh Perencanaan Pajak, *Tunneling Incentive* dan Aset Tidak Berwujud terhadap Perilaku *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016” yang dibuat oleh Jafri dan Mustikasari (2018). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *transfer pricing* sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu perencanaan pajak, *tunneling incentive* dan aset tidak berwujud. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari analisis data yang telah dilakukan peneliti yaitu perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, sedangkan aset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

2.7.2. Tabel Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1.

Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Alat Analisis	Variabel		Hasil Penelitian
		Dependen	Independen	
Kiswanto (2014)	Regresi linier berganda	Variabel Dependen: <i>Transfer pricing</i>	Variabel Independen: Pajak, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan	Pajak dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> , sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif <i>transfer pricing</i> .
Azizah dan Marfuah (2014)	Regresi logistik	Variabel Dependen: <i>Transfer pricing</i>	Variabel Independen: Pajak, <i>tunneling incentive</i> , dan <i>exchange rate</i>	Pajak berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i> , <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> , sedangkan <i>exchange rate</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .
Noviastika, dkk. (2016)	Regresi logistik	Variabel Dependen: <i>Transfer pricing</i>	Variabel Independen: Pajak, <i>tunneling incentive</i> , dan <i>good corporate governance</i>	Pajak dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> , sedangkan <i>good corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .

Refgia (2017)	Regresi linier berganda	Variabel Dependen: <i>Transfer pricing</i>	Variabel Independen: Pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, dan kepemilikan asing	pajak berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> , mekanisme bonus dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , sedangkan kepemilikan asing berpengaruh positif <i>transfer pricing</i> .
Jafri dan Mustikasari (2018)	Regresi linier berganda	Variabel Dependen: <i>Transfer pricing</i>	Variabel Independen: Perencanaan pajak, <i>tunneling incentive</i> dan aset tidak berwujud	Perencanaan pajak berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i> , <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> , sedangkan aset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Beban Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Perusahaan tentunya ingin memaksimalkan laba yang diperoleh serta membayar pajak seminimal mungkin. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan multinasional adalah dengan melakukan penghindaran pajak dengan skema *transfer pricing*. Menurut Kurniawan (2015), perusahaan multinasional melalui *transfer pricing* akan berusaha mengalihkan penghasilan kena pajaknya ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah supaya beban pajak yang ditanggung grup perusahaan menjadi lebih kecil. Maka, semakin tinggi

tarif pajak suatu negara dan semakin besar beban pajak yang ditanggung perusahaan maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan akan melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing*.

Teori tersebut diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kiswanto (2014), Noviasitika dkk. (2016), serta Refgia (2017) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Untuk itu, berdasarkan landasan teori yang didukung dengan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

HA₁: Beban pajak berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

2.8.2. Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing*

Dunstanc, *et al.* (2007) menjelaskan bahwa kepemilikan asing merupakan porsi *outstanding share* yang dimiliki oleh pihak yang berstatus luar negeri terhadap jumlah seluruh modal saham yang beredar. Maka, semakin tinggi persentase kepemilikan asing tersebut menunjukkan semakin besar juga kendalanya terhadap pengelolaan perusahaan serta mereka akan berusaha mengalokasikan sumber daya perusahaan serta mempengaruhi kebijakan penentuan harga maupun jumlah dalam transaksi *transfer pricing* untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau yang sering disebut sebagai praktik ekspropriasi. Maka, semakin besar persentase kepemilikan asing pada suatu perusahaan, semakin besar juga kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*.

Teori tersebut diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kiswanto (2014), serta Refgia (2017) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Untuk itu, berdasarkan landasan teori yang didukung dengan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

HA₂: Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

2.8.3. Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*

Tunneling incentive adalah merupakan kegiatan dimana pemegang saham mayoritas dengan mudah dapat mentransfer sumber daya dari perusahaan serta melakukan transaksi-transaksi untuk keuntungannya sendiri. Transaksi tersebut dapat berupa penjualan aset dan kontrak seperti *transfer pricing* yang dapat menguntungkan pemegang saham mayoritas (Johnson, *et al.*, 2000). Pemegang saham mayoritas dapat mendorong perusahaan untuk melakukan *tunneling incentive* yang dapat menguntungkan dirinya. Sehingga, semakin semakin besar *tunneling incentive* yang dilakukan oleh perusahaan maka akan semakin besar juga kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* dalam transaksi penjualan kepada pemegang saham mayoritas.

Teori tersebut diperkuat dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azizah dan Marfuah (2014), Noviasatika, dkk. (2016) serta Jafri dan Mustikasari (2018) yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Untuk itu, berdasarkan landasan teori yang didukung

dengan hasil penelitian terdahulu tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

HA₃: *Tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

